

**MENSINERGIKAN DATA BERBAGAI DEPARTEMEN
PEMERINTAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SERTA PELATIHAN
UKM UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN**

Warno dan Dwi Prawani S.R

Dosen Tetap dan PNS DPK STIE Semarang

Abstraksi

Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang sulit terpecahkan, pemerintah bahkan dunia sudah membuat planing untuk menyelesaikan tersebut namun dilapangan rencana tersebut tidak berjalan maksimal maka diperlukan pensinergian dari berbagai lembaga yang terkait (lemabaga pemerintah, perbankan, kampus, UKM, dan masyarakat serta lainnya yang terkait) sehingga planing tersebut bisa dijalankan secara tepat

Kata kunci : *sinergi, departemen, lembaga keuangan, kemiskinan, pengangguran*

Pendahuluan

Pemerintah sudah membuat rancangan yang detail untuk menanggulangi kemiskinan sebagai berikut :

Agenda Konstitusional

1. Nasional:
 - o Bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa
 - o Pancasila & UUD 45/amandemen (landasan idiil dan konstitusional), penanggulangan kemiskinan sebagai agenda konstitusional;
 - o Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2005 – 2009;
 - o Strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK) masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM);
2. Internasional:
 - o Millennium Development Goals (MDG's), komitmen internasional untuk menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi setengahnya pada tahun 2015 (29 – 14,5% atau 1,2 triliun menjadi 890 milliar).
 - o World Summit on Sustainable Development 2002: pk sebagai agenda prioritas

dalam pembangunan.

Paradigma baru Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran	=	Pembangunan manusia
Langkah	=	Perubahan struktur masyarakat : >> kesempatan kerja/berusaha >> peningkatan kapasitas/pendapatan >> perlindungan sosial/kesejahteraan
Fokus	=	Penduduk miskin produktif (usia antara 15 – 55 tahun)
Peran	=	Pemerintah : Fasilitator
Stakeholder		Masyarakat : Pelaku Usaha Perbankan : Pembiayaan KKMB/BDS : Pendamping
Tujuan	=	MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

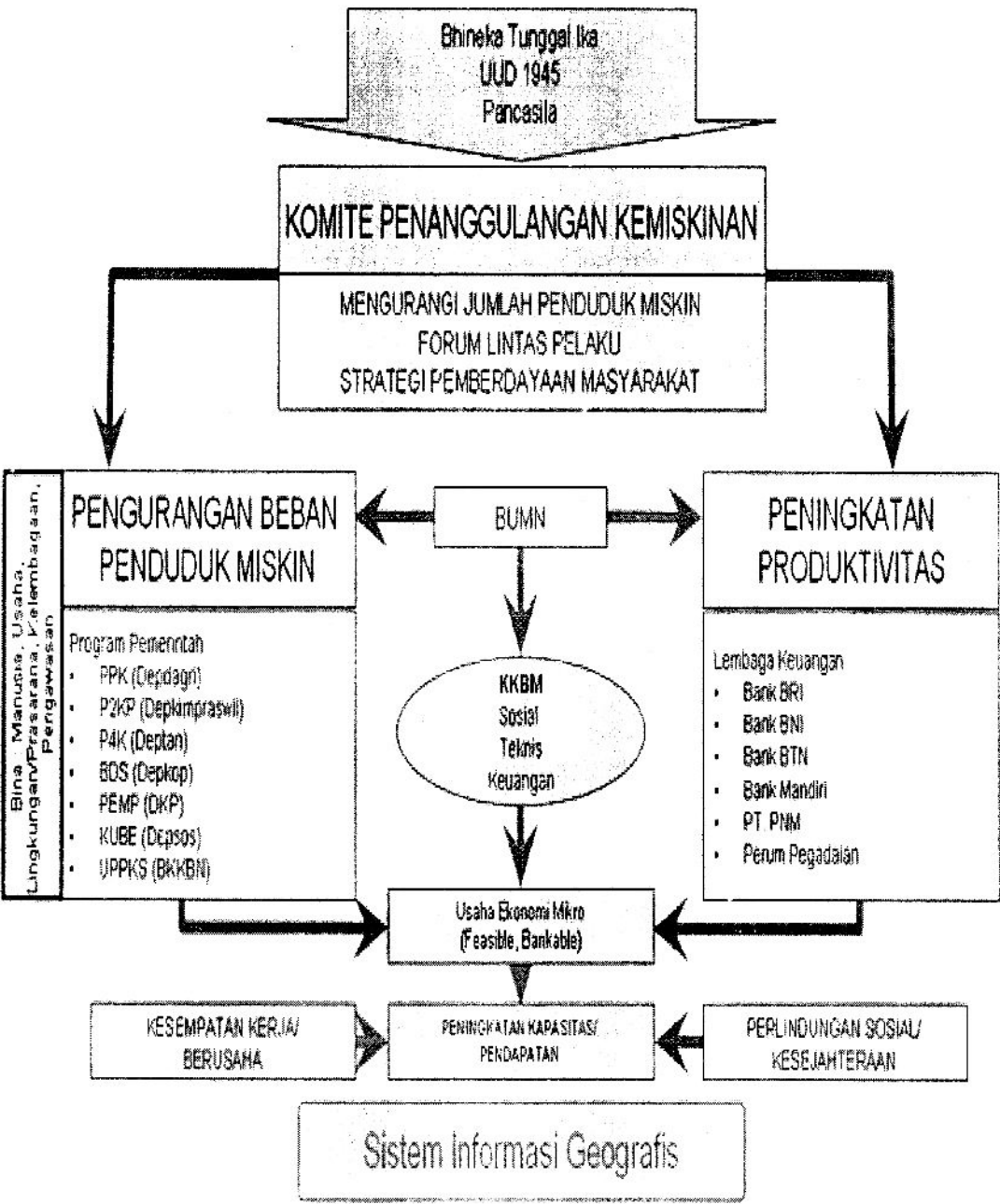
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

1. Pemberdayaan masyarakat: Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkuat martabat manusia dan bangsa
2. Aspek manusia, usaha, dan lingkungan (sarana prasarana)
3. Proses: penyiapan (enabling), penguatan (strengthening), dan perlindungan (protecting)
4. Sasaran:
 - o Pra produktif (< 15 thn), Produktif (15 – 60 thn), Pasca produktif (> 60 thn)
5. Fokus sasaran: pemberdayaan masyarakat miskin produktif dalam wujud pemberdayaan UMK.

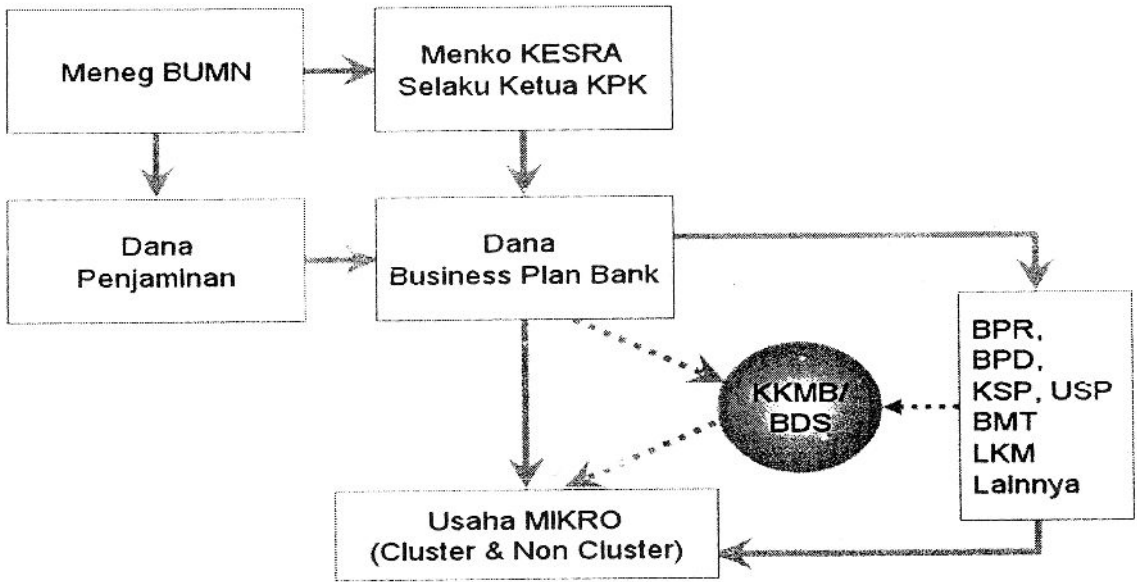
6. Dicapai melalui 2 upaya:

- o mengurangi beban orang miskin
- o Meningkatkan produktivitas dan pendapatan masy. Miskin produktif

Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha MIKRO



Pola Penyaluran Dana Program



Fokus Penanggulangan Kemiskinan



Langkah-Langkah Strategis Pemberdayaan Usaha Mikro

- Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan umkm secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan.

- Menciptakan sistem penjaminan (financial guarantee system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro.
- Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan "status usaha" usaha mikro agar "feasible" dan "bankable" dalam jangka panjang.
- Penataan dan penguatan kelembagaan keuangan mikro untuk memperluas jangkauan pelayanan keuangan kepada usaha mikro secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

Kebijakan Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pk

- Mou KPK - bi mengenai penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan umkm: penciptaan iklim yang kondusif bagi usaha mikro dan kecil;
- Mou sekretaris KPK – Deputy Gubernur Bank Indonesia :pemberdayaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk mempercepat penyaluran kredit UMKM;
- Program kredit kepercayaan usaha mikro (KKUM): penjaminan kredit;
- Program kredit usaha mikro kecil (KUMK) dana sup-005: mekanisme two step loans (linkage program bank UMUM – LKM);

MOU BI – KPK

- ALASAN DIADAKAN MOU:
 - Bi independen terhadap pemerintah (tidak lagi menyalurkan kredit program bersubsidi)
 - Bi tidak independen terhadap negara/rakyat
 - Mendorong keterlibatan perbankan nasional dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil
- MANFAAT MOU:
 - Diperkenalkan istilah "mikro"

- Alokasi “business plan” untuk umkm meningkat
- MOMENTUM KEBANGKITAN UMKM:
 - Hambatan permodalan dapat dihilangkan (perbaiki supply & demand permodalan)
 - Peningkatan kinerja UMKM

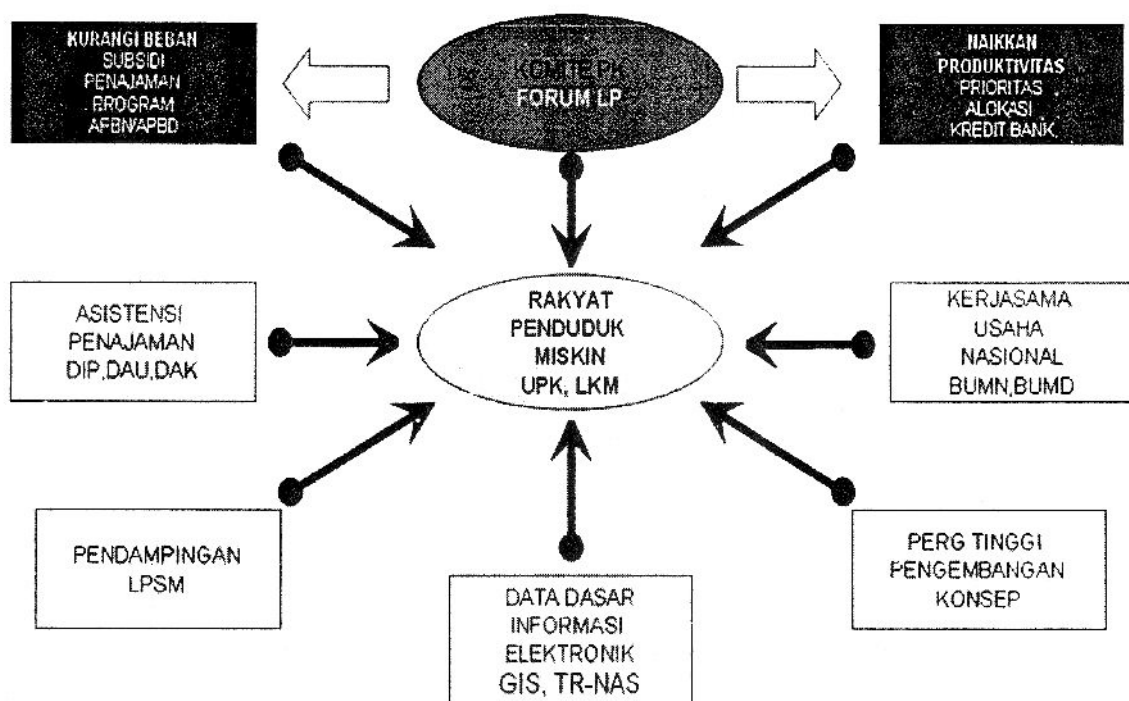
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)

- Meningkatkan daya serap dana MOU BI-pemerintah
- Penghubung bank/lembaga keuangan dg UMKM (UMKM adalah ekonomi rakyat)
- Pendamping UMKM: BDSP-P
- Pendamping “purna” (dari mulai identifikasi potensi, pendampingan, pencairan - penyaluran, pengembalian, pengembangan)
- Calon kkmb: pendamping sektoral (seperti PLKB, FASKEL – P2KP, FD – PPK, PENDAMPING PEMP), swasta (INKINDO, SWISS CONTACT, IWAPI), LSM, PERGURUAN TINGGI dll.

KKUM

- Kredit usaha mikro tanpa agunan tambahan
- Skema kredit untuk usaha mikro dengan syarat ringan, yang didukung oleh bank pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank
- Dana yang disalurkan 100 % dana business plan lembaga keuangan.
- Resiko macet: 90 % ditanggung lembaga keuangan, sisanya 10 % oleh dana penjaminan PKBL.
- Pengertian layak, mengikuti syarat 5 C (*character, condition of economic, capacity to repay, capital dan collateral substitute*)

SINKRONISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Rencana yang tersusun secara detail diatas dalam prakteknya dilapangan tidak sesuai dengan harapan karena kordinasi dan sinergi antar bagian yang saling terkait tidak berjalan dengan semestinya.

Realita yang ada, sebagaimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya terdapat kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kurangnya modal usaha.
2. Kemampuan manajerial yang rendah sehingga tidak mampu melakukan pengelolaan usaha dengan baik, terutama dalam mengelola keuangan usahanya.
3. Kurangnya wawasan dan pengetahuan yang dimiliki UMKM sebagai dasar untuk melakukan perubahan-perubahan menuju ke arah lebih baik.
4. Belum maksimalnya peran paguyuban yang ada untuk mempermudah permodalan dan bahan baku.
5. Persaingan usaha yang tidak sehat.

Di samping kelemahan tersebut di atas, terdapat pula kelebihan yang merupakan potensi yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Tersedianya tenaga kerja yang cukup terampil.

2. Cukup banyaknya permintaan dari pasar karena harganya yang relatif murah.
3. Pasarnya relatif luas.
4. Ikatan kekeluargaan yang tinggi dan sifat gotong royong yang masih kental diantara pengusaha.

Berdasar pada situasi umum wilayah serta kelebihan dan kelemahan yang ada, maka sangat potensial untuk dilakukan pensinergian antar instansi yang terkait, setelah itu pelatihan dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. STIE Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Semarang berkewajiban untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada UMKM dalam rangka ikut serta memberdayakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Tinjauan Pustaka

Sejak pertengahan dasawarsa 80-an ekonomi Indonesia ditopang oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang berkecimpung dalam berbagai sektor. Menurut laporan Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (*UNCTAD, United Nation Commission For Trade And Development*) peran usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia masih sangat kurang dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Di tengah ambruknya industri skala besar, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa industri, mikro, kecil dan menengah (UMKM) justru masih tetap hidup dan berjalan dengan baik. Ditengah-tengah situasi perusahaan-perusahaan besar menghadapi kesulitan untuk beroperasi, perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan menengah tetap berjalan seperti biasa. Bahkan beberapa sektor usaha mikro, kecil dan menengah justru mendapatkan keuntungan besar akibat depresiasi rupiah terhadap dollar. Hal ini terutama terjadi pada jenis-jenis komoditi kerajinan yang berorientasi ekspor.

Dengan demikian, krisis yang telah menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesadaran bahwa dalam perekonomian

nasional, sektor usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Pentingnya posisi sektor usaha mikro, kecil dan menengah ini tidak hanya memperkuat industri nasional, tetapi juga karena keterkaitan dengan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam tabel di bawah ini, bahwa 99,6% tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah ini. Untuk selengkapnya dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1.
Struktur Ekonomi Indonesia

Ukuran	UMKM	Usaha Besar
Jumlah	99,8%	0,2%
Kontribusi Terhadap PDB	39,8%	60,2%
Pangsa Pasar	20%	80%
Pertumbuhan Ekonomi	16,4%	83,6%
Penyerapan Tenaga Kerja	99,6%	0,4%

Sumber : Usahawan No. 04 TH. XXXI April 2002

UMKM : Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Karena itu, perlu ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, agar sektor ini bisa berkembang lebih baik. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sama dengan meningkatkan kehidupan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia atau siapa saja yang terlibat dalam usaha mikro, kecil dan menengah tersebut (UMKM). Dalam hal inilah pentingnya mencari berbagai pendekatan yang paling efektif untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

Pada dasarnya, upaya pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan adanya otonomi daerah yang mengandung implikasi pembangunan daerah, sangat tergantung pada kemampuan daerah pula. Sehingga pengembangan potensi ekonomi daerah dari penggalian sumber-sumber ekonomi baru, menjadi perhatian bagi kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah. Pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya pengembangan potensi ekonomi daerah dan dimungkinkan memberikan pengaruh terhadap terciptanya motivasi, inovasi, serta kreativitas semua pihak di dalam menggali sumber-sumber ekonomi baru. Karena itu, kebijakan pembinaan UMKM hendaknya bertujuan mewujudkan lahirnya pengusaha-pengusaha tangguh dan mampu menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. Sehingga kebijakan pembinaan UMKM tersebut mampu mencapai sasaran terjadinya peningkatan jumlah pengusaha yang memiliki daya saing tinggi, mandiri dan tangguh (Karjantoro, 2002).

UMKM merupakan salah satu sector informal, keberadaan sector informal dipandang mampu memberikan jalan keluar bagi para penganggur dan tenaga kerja berlebih di kota walaupun daya serap dalam arti kegiatan yang sungguh-sungguh produktif, dibatasi oleh besarnya dan pertumbuhan industri besar di kota. Di sisi lain mobilitas angkatan kerja dalam sector informal menjadi relatif lebih tinggi karena tidak adanya hubungan kontrak jangka panjang. Hal tersebut merupakan salah satu faktor utama yang mempermudah tenaga kerja memasuki sector informal. Beberapa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan tetap di sector formal bisa bekerja dalam sector informal sementara atau untuk waktu yang lama dari pada menganggur sama sekali.

Dengan demikian istilah sector informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Karena mereka yang terlibat dalam sector ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah, tidak terampil, dan kebanyakan para migran. Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang dikenal pada umumnya. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dalam menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.

Menurut Arundhati dalam C. Supartomo dan Edi Rusdiyanto (2000), sektor informal dapat diartikan sebagai kelompok/golongan yang usahanya berskala kecil, meliputi pedagang kaki lima, pemulung, usaha industri kecil, dan kerajinan rumah tangga. Dalam situasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu, ternyata sektor informal dianggap lebih mampu bertahan hidup dibanding sektor usaha yang lain. Sektor informal yang dalam hal ini adalah pengrajin batik tulis bersifat lebih *independent* dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya. Dengan daya adaptasi yang tinggi secara cepat dan usaha antisipasi perkembangan dalam lingkungan usaha tersebut, maka usaha di sektor informal dapat bertahan dalam keadaan yang sesulit apapun. Selain itu sektor usaha ini juga mampu mengidentifikasi peluang yang muncul dibalik era perubahan yang terus menerus terjadi serta mampu menangkap peluang yang ada menjadi sumber ekonomi yang menjanjikan.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berakar dari pemberdayaan ekonomi yang ada di masyarakat. Beberapa aspek yang terkait dalam pengembangan ekonomi kerakyatan antara lain: pertama, infrastruktur; kedua, *capital*; ketiga, jaringan kerja (pemasaran, informasi manajemen, dan teknologi); dan keempat, *capacity building* (sumber daya manusia dan kelembagaan) (Umar Juoro, 2000).

Untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya dan berkembang, tentu saja melewati beberapa usaha dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi adalah pemberdayaan sumber daya manusianya dengan memberikan penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan sehingga diharapkan mereka lebih berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu memberi nilai tambah pada usaha yang dilakukan dari memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah serta memasarkannya sehingga dapat memberi kontribusi kepada ekonomi keluarga.

Untuk memberdayakan UKMK maka dibutuhkan manajemen yang baik dan profesional. Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan

melalui orang lain. Hal tersebut berarti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri (Mary Parker Follet dalam T. Hani Handoko, 1991).

Stoner (1982) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*). Secara umum manajemen dalam sebuah usaha minimal harus mempunyai bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian sumber daya manusia. Ada tiga alasan mengapa manajemen diperlukan pada suatu organisasi, yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah terutama UMKM dalam mengembangkan usaha bukanlah hanya permodalan, tetapi juga berkaitan dengan aspek lainnya. Dari sisi aspek manajemen, antara

lain kurang mampu mempertahankan mutu, kurang mampu membina saluran informasi mengenai usahanya, kurang mampu membuat catatan administrasi secara tertib, tidak membuat perencanaan secara tertulis, sangat tergantung pada pelanggan dan pemasok sekitarnya, kurang mampu membina hubungan dengan perbankan. Sementara kendala yang berkaitan dengan administrasi keuangan, antara lain banyak dari mereka yang belum atau tidak mengerti pencatatan keuangan/akuntansi. Ada juga yang sudah mulai menggunakan pencatatan akuntansi tetapi masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan, dan sebagainya. Kendala yang berkaitan dengan keuangan ini membuat pengusaha tidak bisa membuat proposal sesuai dengan kepentingan perbankan.

Seperti halnya survei yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) menemukan sejumlah kendala yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Secara ringkas, kendala yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan menengah, selain permodalan adalah pemasaran, pengadaan bahan baku, teknik produksi dan persaingan pasar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.

Kendala Yang Dihadapi Usaha Mikro, kecil dan menengah

Jenis Kesulitan	IKR	IK
1. Kesulitan Modal	40,48%	36,63%
2. Pengadaan Bahan Baku	23,75%	16,76%
3. Pemasaran	16,96%	4,43%
4. Produksi dan Manajemen	3,07%	26,89%
5. Persaingan Lainnya	15,74%	17,36%

Sumber: BPS, diolah.

IKR : Industri Mikro, kecil dan menengah Rumah Tangga.

IK : Industri Mikro, kecil dan menengah.

Untuk itu sudah saatnya pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, perguruan tinggi sudah sepatutnya memerankan diri sebagai

pendamping dalam pengembangan potensi UMKM, sehingga pengusaha mikro, kecil dan menengah akan semakin meningkat taraf hidup dan pendapatan bagi pelaku usaha dari UMKM sehingga akan meningkatkan pula taraf hidup rakyat banyak. STIE Semarang yang merupakan salah satu perguruan tinggi di Semarang dalam rangka bentuk pengabdian kepada masyarakat memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka mengembangkan sektor UMKM. Usaha ini dijalankan bekerjasama dengan semua pihak baik pemerintah, swasta dan *stakeholder* yang lain, khususnya yang memiliki komitmen yang sama dalam pengembangan sektor UMKM.

Kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih belum dikatakan tinggi dapat disebabkan antara lain karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, sehingga mereka kurang mampu mengembangkan dan mengelola secara baik potensi yang mereka miliki yaitu ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan sifat kegotongroyongan yang tinggi. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

- a. Belum sinerginya antar instansi yang terkait
- b. UMKM belum merasa tersentuh oleh rencana pemerintah tersebut
- c. Minimnya pengetahuan tentang manajemen usaha yang baik, terutama dalam memasarkan produk dan pembukuan, sehingga produk mereka dapat memiliki nilai tambah.
- d. Persaingan usaha yang tidak sehat.
- e. Belum optimalnya peran dan fungsi kelompok usaha (paguyuban) UMKM selama ini.

Adapun asumsi dan batasan yang digunakan dalam penerapan IPTEKS ini adalah:

1. Mensinergikan, yaitu menghubungi instansi yang terkait (departemen pemerintah, lembaga keuangan dan UMKM)
2. Pelatihan, yaitu pemberian materi tentang manajemen usaha kecil (UMKM) dengan metode ceramah dan praktek.

3. Pendampingan, yaitu memberikan arahan memasarkan produk batik yang baik agar volume penjualan mereka lebih tinggi atau meningkat.
4. Peserta pelatihan adalah UMKM yang berminat.

Pembahasan

a. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang diajukan dapat digambarkan sebagai berikut:

Kota Semarang mempunyai potensi sumber daya. Penggalan potensi dilakukan oleh tim STIE Semarang. Potensi yang cukup menonjol adalah ketersediaan tenaga kerja terampil yang belum dioptimalkan secara baik dan professional.

STIE 'Semarang' sebagai Perguruan Tinggi bertanggung jawab memberi sumbangan pemikiran dan pembinaan bagi masyarakat. Berbagai alternatif dapat dilakukan untuk mewujudkannya baik dalam bentuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat berbentuk mensinergikan antar instansi, pelatihan dan pendampingan sesuai dengan potensi wilayah yang bersangkutan.

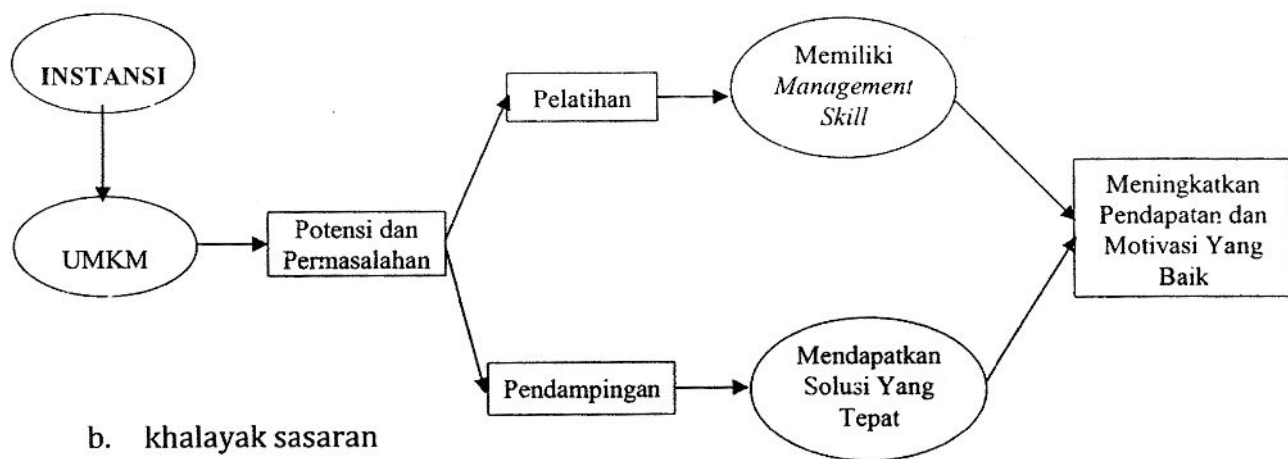
Berdasarkan potensi yang ada, maka alternatif yang dilakukan adalah melakukan pensinergian antar instansi dari pemerintah yang tergabung dalam wadah yang bertujuan memajukan UMKM dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, dilanjutkan pelatihan manajemen usaha yang dititikberatkan pada bagaimana berproduksi yang baik, memasarkan produk dengan baik, dan mengelola serta membukukan keuangan secara baik. Pelatihan dilanjutkan dengan pengoptimalan fungsi dan peran paguyuban di Kota Semarang. Pendampingan dilakukan selama tiga bulan setelah pelatihan kemudian dilanjutkan evaluasi.

Usaha pensinergian, pelatihan dan pendampingan terhadap UMKM akan dinilai berhasil dengan indikasi:

1. Antar instansi tersinergi dan mendampingi UMKM

2. Meningkatnya pendapatan UMKM di dalam paguyuban sendiri dan sekitarnya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, perluasan jaringan pasar sampai ke pasar luar negeri (ekspor), dan menciptakan lapangan kerja.
3. Tumbuhnya usaha-usaha pendukung seperti, desainer produk (*designer product*), pengepakan, jasa eksportir, transportasi, pemasok (*supplier*), sektor telekomunikasi, lembaga keuangan, agen pemasaran, pariwisata dan lain-lain.
4. Tumbuhnya usaha spesifik lokal yang lebih kompetitif dan *marketable*.
5. Dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah dari pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
6. Jangka panjang diharapkan dapat menyumbangkan devisa negara melalui kegiatan ekspor.

Adapun gambar pemecahan masalah dapat dilihat di bawah ini:



b. khalayak sasaran

Khalayak sasaran dalam penerapan IPTEKS ini adalah UMKM di Kota Semarang Jawa Tengah dalam hal ini UMKM belum ditentukan menyesuaikan hasil data dari pensinergian antar instansi yang tergabung dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

c. Keterkaitan

Kegiatan yang dilakukan memiliki keterkaitan antara STIE Semarang dan Pemerintah Kota Semarang. STIE 'Semarang' berperan dalam transfer

pengetahuan kepada masyarakat (UMKM) dalam memajukan usahanya. UMKM yang telah berhasil akan dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus akan dapat menggerakkan perekonomian di daerah Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.

d. *Metode Kegiatan*

Kegiatan dimulai dari mensinergikan instansi yang tergabung dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, dilanjutkan pemberian materi yang berisi: motivasi berwirausaha, manajemen usaha, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Adapun metode yang digunakan adalah: ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pemateri berasal dari staf pengajar STIE Semarang maupun dinas terkait. Sedangkan pendampingan dilakukan dengan memberikan masukan dan solusi seputar permasalahan yang dihadapi oleh umkm di kota Semarang.

e. *Rancangan Evaluasi*

Evaluasi pertama pada instansi

Evaluasi kegiatan diadakan baik sebelum, pada saat maupun setelah kegiatan dilaksanakan. Evaluasi sebelum dilaksanakan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta dengan maksud untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal serta kemauan dari peserta.

Evaluasi pada saat kegiatan ini dilaksanakan melalui tanya jawab serta praktek. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diberikan dapat dipahami dan dimengerti serta mampu dipraktekkan oleh peserta.

Sedangkan evaluasi setelah kegiatan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah setelah kegiatan pelatihan berakhir peserta telah memahami dan mengerti serta mempraktekkan pengetahuan yang didapatkannya. Adapun hal-hal yang dievaluasi meliputi:

- a. Motivasi berwirausaha, peserta menjadi termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

- b. Manajemen usaha, peserta dapat mengetahui bagaimana mengelola usaha yang baik dan profesional.
- c. Manajemen keuangan, peserta dapat mengetahui dan mampu untuk mengaplikasikan administrasi pembukuan secara baik dan benar.
- d. Manajemen produksi, peserta dapat mengetahui bagaimana proses produksi dapat lebih efisien dan efektif serta menghasilkan produk yang berkualitas.
- e. Manajemen pemasaran, peserta dapat mengetahui bagaimana cara memasarkan produk dengan berbagai macam strategi pemasaran yang digunakan sehingga volume penjualan dapat meningkat.

Evaluasi ini dilakukan dua tahap yaitu: satu bulan setelah pelatihan dan dua bulan setelah evaluasi tahap I.

Kesimpulan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang sulit terpecahkan, pemerintah bahkan dunia sudah membuat planing untuk menyelesaikan tersebut namun dilapangan rencana tersebut tidak berjalan maksimal maka diperlukan pensinergian dari berbagai lembaga yang terkait (lemabaga pemerintah, perbankan, kampus, UKM, dan masyarakat serta lainnya yang terkait) sehingga planing tersebut bisa dijalankan secara tepat

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Rembang Dalam Angka, Rembang 2003.

Badan Pusat Statistik, 2002.

C. Supartomo dan Edi Rusdiyanto, 2000. *Profil Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pinggiran Perkotaan*, [Http://202.159.18.43/jsi/112Supartomo.htm](http://202.159.18.43/jsi/112Supartomo.htm).

Disperindagkop Kab. Rembang, 2004

James A.F. Stoner, *Management*, Edisi Kedua, Prentice Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York, 1982.

Karjantoro, H., April 2002, Usaha Kecil dan Problem Pemberdayaannya, *Majalah Usahawan*, No. 04 TH XXXI.

Riskin Hidayat, 2003, Motivasi Berwirausaha Bagi Mahasiswa dalam Menciptakan Usaha Kecil Menengah Baru, *Refleksi* NO. 012/VIII/AGUSTUS/2003, Universitas Muhammadiyah Magelang.

T. Hani Handoko, 1991, *Manajemen*, Edisi Kedua, Yogyakarta : BPFE.

Usahawan No. 04 TH. XXXI April 2002

Umar Juoro, 2000, *Mengembangkan Ekonomi Rakyat dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, Cetakan I, Jakarta : PINBUK.